

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era otonomi daerah seperti saat ini, salah satu aspek yang harus diperhatikan dengan seksama adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Keuangan daerah merupakan dokumen publik yang berhak diketahui oleh masyarakat. Hal ini didukung oleh besarnya tuntutan masyarakat sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sehingga Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan setiap laporan keuangan daerah ke masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi keuangan negara merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik mengingat secara definitif kualitas pemerintahan yang baik (*good governance*) ditentukan oleh kedua hal tersebut ditambah dengan peran serta masyarakat dan reformasi hukum. Transparansi atas aktivitas pengelolaan keuangan negara kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi sangat diperlukan (Mardiasmo, 2004).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan informasi yang dihasilkan oleh proses akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, atau kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah (Halim, 2007).

Pemakai laporan keuangan (*users of accounting information*) perlu menjadi pertimbangan penyusun standar akuntansi. Dengan mengetahui siapa dan bagaimana kedudukan yang dituju terhadap organisasi atau badan usaha, maka *users of accounting information* menjadi pertimbangan penting apakah suatu informasi harus disediakan dalam pelaporan keuangan (Suwardjono, 2005). Setelah mengetahui siapa yang akan dituju, maka pertimbangan selanjutnya adalah apakah informasi yang disajikan tersebut dapat dipahami oleh pemakai. Dapat dipahami (*understandability*) artinya Laporan Keuangan harus memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh pihak-pihak pengguna laporan keuangan (Mahmudi, 2019).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Pemerintah Daerah setiap periodenya harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. LKPD digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu dalam mengevaluasi ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan yang harus dipenuhi agar mempunyai informasi yang bermanfaat menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah: 1) relevan, 2) andal, 3) dapat dibandingkan, dan 4) dapat dipahami.

Laporan keuangan yang dibuat pemerintah daerah dapat bermanfaat ketika informasi yang disajikan merupakan informasi yang tepat dan pemakai dapat memahami informasi yang terkandung di dalamnya. Stakeholder pemakai laporan keuangan pemerintah daerah harus memahami karakteristik laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat menggunakan informasi akuntansi tersebut sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau keputusan. Untuk dapat memahami karakteristik laporan keuangan tersebut pemakai dapat mempelajari karakteristik laporan keuangan. Betapapun bagus penyajian laporan keuangan, laporan keuangan tersebut tidak akan bermanfaat apabila pemakai tidak mengetahui manfaatnya sehingga laporan keuangan yang sebenarnya bermanfaat menjadi tidak terpakai karena pemakai tidak memahami dan tidak bersedia belajar cara memahaminya.

Pemerintah melalui presiden telah menetapkan Keputusan Presiden No. 84 tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden No. 2 Tahun 2005. Keputusan inilah yang kemudian dijadikan dasar ditetapkannya PP No. 24 Tahun 2005 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lebih lanjut, PP No. 24 Tahun 2005 berisi pedoman penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat/daerah dan merupakan standar bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi akuntansi di pemerintahan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa kriteria yaitu: 1). Kesesuaian dengan standar akuntansi

pemerintahan, 2). Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), 3). Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 4). Efektivitas pengendalian intern. Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang dimana terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau *disclaimer of opinion*. Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos-pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Identifikasi atas faktor-faktor yang potensial menyebabkan laporan keuangan menjadi belum (kurang) berkualitas, merupakan langkah penting untuk selanjutnya melakukan berbagai penyempurnaan di masa mendatang. Ariefsetya (2018) dalam penelitiannya mengidentifikasi sedikitnya ada 3 faktor yang dipertimbangkan signifikan dalam mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan, yaitu: 1) sumber daya manusia, 2) sistem pengendalian intern, 3) penerapan standar akuntansi pemerintahan. Sementara

Ikang Murapi (2016) dalam penelitiannya mengidentifikasi 4 faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, yaitu: 1) kompetensi sumber daya manusia, 2) penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, 3) pemanfaatan teknologi informasi, 4) sistem pengendalian intern.

Menurut Sukmaningrum (2012) Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.

Hal lain yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian intern. Menurut Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pra survei terkait dengan kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi diketahui bahwa ada beberapa kantor yang hanya satu komputer dan yang terhubung internet. Pegawai kurang mendapatkan sosialisasi aplikasi terbaru

dan pegawai juga kurang dalam mengikuti workshop atau pelatihan-pelatihan untuk membantu penguasaan dan pengembangan keahlian pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Kapasitas sumber manusia yang rendah dalam mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang menyebabkan tumpang tindih jabatan/rangkap jabatan seperti yang terjadi di salah satu kantor OPD di Kabupaten Malaka. Hal mengidentifikasi masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia, dan lemahnya pengendalian internal. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk memilih satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Malaka sebagai objek untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang disebutkan yaitu mengenai kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi.

Hal ini didukung oleh hasil audit BPK dalam Laporan Keuangan tahun 2017-2019 yang mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun 2017-2018 dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun 2019.

Tabel 1.1
Data Perkembangan Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka.

Tahun	2017	2018	2019
Opini BPK	WDP	WDP	WTP

Sumber Data : LHP BPK RI

Dari Uraian Tabel 1.1 diatas, terdapat permasalahan yang setiap tahun hampir selalu menjadi temuan BPK pada LHP Pemerintah Kabupaten Malaka. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pengelolaan Aset Tetap.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Malaka menyajikan saldo aset tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp 666.797.872.768, dimana terdapat kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas proses penatausahaan dan penyajian Aset Tetap yaitu aset Tanah sebesar Rp. 39.934.530.000,00 dibawah ruas jaringan dan daerah irigasi sebesar Rp. 463.975.204.714,05 belum dicatat secara menyeluruh. Tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka menyajikan nilai aset tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp 989.163.503.419,47. Terdapat beberapa kelemahan pengendalian intern yang signifikan atas inventarisasi yang dilaksanakan pada 85 Sekolah Dasar Negeri dan terdapat Aset Tetap Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi yang belum dilakukan kapitalisasi ke aset induk. Dan pada tahun 2019 BPK Menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka dan opini yang diberikan adalah Wajar Tanpa Pengecualian. Namun masih terdapat kelemahan yang harus jadi perhatian Pemerintah Kabupaten Malaka, diantaranya terkait, Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Malaka yang belum optimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian sehubungan dengan fenomena yang terjadi dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan disampaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran tentang sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap

kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka?

2. Apakah faktor sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka?
3. Apakah faktor sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
2. Untuk menguji dan menganalisis secara parsial faktor sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
3. Untuk menguji dan menganalisis secara simultan faktor sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dasar acuan dalam meningkatkan mutu Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Malaka.
2. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menjadi sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh peneliti dibangku kuliah.